



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK,
DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2013-2014
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BNP2TKI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 10 Februari 2014
Pukul	: 12.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan capaian kinerja atas program/kegiatan prioritas Tahun 2013;2. Pembahasan dan penjelasan mengenai Kebijakan Rencana Proram (RKP) Prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) BNP2TKI Tahun 2014.3. Membahas pelaksanaan Pasar Bebas Tahun 2015 dan kesiapan Pemerintah, serta dampaknya bagi TKI.4. Membahas Program Peningkatan Perlindungan TKI dan keluarga, serta sinergitas dan koordinasi yang sudah dijalankan oleh BNP2TKI dengan instansi terkait, terutama dengan konsorsium asuransi, dalam rangka memaksimalkan perlindungan TKI di luar negeri.5. Penjelasan mengenai remitansi TKI selama Tahun 2013 yang diperkirakan mencapai 120 trilyun.
Ketua Rapat	: Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir : A. Kepala BNP2TKI beserta jajaran.
B. Komisi IX DPR RI
orang dari 50 orang Anggota Komisi IX
DPR RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibuka pukul 13.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk meningkatkan perlindungan TKI secara optimal terkait permasalahan yang terjadi secara berulang dan melakukan validasi data secara akurat terhadap TKI formal dan informal, TKI legal dan illegal, dan kasus-kasus hukum TKI lainnya.
2. Komisi IX DPR RI mendorong pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada TKI, perluasan kewenangan dan kelembagaan, dan peningkatan anggaran perlindungan TKI.
3. Komisi IX DPR RI mendukung Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dibentuknya BP3TKI Provinsi Jawa Timur.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggarannya secara optimal termasuk peningkatan kapasitas dan keahlian TKI, sosialisasi perlindungan TKI, pencegahan penyelewengan pra penempatan, fasilitas pelayanan di luar negeri dalam rangka memaksimalkan perlindungan dan pelayanan TKI.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk melaporkan Konsorsium Asuransi yang tidak menyelesaikan klaim-klaim asuransi TKI kepada OJK dan Kepolisian Negara RI.
6. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Raker dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Menakertrans RI, Kapolri dan BNP2TKI dalam rangka perlindungan kepada TKI termasuk TKI ilegal, permasalahan visa, pelaku-pelaku penyelewengan hukum dan dalam rangka mendorong pembahasan RUU PPILN.

Rapat diakhiri pukul 15.15 WIB

KETUA RAPAT,


Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si